JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 3, Agustus 2026, pp. 2917-2928
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Analisis Efektivitas Kebijakan Selektivitas Visa Kunjungan terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Penerimaan Negara di Indonesia

Aghits Khoiru Zikri Wibowo [a,1,*], Enggar Eka Fahrurriza[b,2], Edziardo Mathew Pandapotan [c,3], Maidah Purwanti[d,4]

[a] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Indonesia.
[b] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Indonesia.
[c] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Indonesia.
[d] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Indonesia.
[1] aghitsbowo@gmail.com; [2] enggarekaf@gmail.com; [3] mathwedziardo@gmail.com;
[4] maidah@poltekim.ac.id

*Correspondent Author; enggarekaf@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
18-06-2026
Revised:
24-07-2026
Accepted:
29-08-2026

Keywords
Selective visa policy, Foreign tourists, Visa, State Revenue, Immigration

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the selective visa policy in relation to the increase in foreign tourist arrivals and state revenue in Indonesia. The study uses a descriptive approach by analyzing secondary data obtained from official immigration and tourism statistics, particularly data on visa issuance, foreign tourist arrivals, and Non-Tax State Revenue (PNBP) from the visa sector. The results show that visa issuance in the first semester of 2026 decreased by 6.77% compared with the same period in 2025. The largest decrease occurred in Visa-Free Visit (BVK), which declined by 87.91%. However, the decrease in visa issuance was not followed by a proportional decrease in foreign tourist arrivals. At the same time, PNBP from the visa sector increased by 6.42%, from approximately IDR 2.65 trillion to IDR 2.82 trillion. These findings indicate that the selective visa policy can regulate access for foreign nationals while maintaining tourism activity and increasing state revenue. Therefore, the effectiveness of the policy should not be measured solely by the number of visas issued, but also by its ability to balance immigration control, foreign tourist mobility, and optimization of state revenue

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas usaha masyarakat, serta mendorong perkembangan berbagai sektor pendukung, seperti

transportasi, perhotelan, kuliner, dan ekonomi kreatif. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan destinasi wisata yang beragam, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mampu mendukung peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan perkembangan pariwisata adalah kebijakan visa kunjungan. Visa merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk memasuki wilayah suatu negara dengan tujuan tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan visa tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif bagi warga negara asing, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pengendalian keimigrasian. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengatur siapa saja yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, tujuan kedatangannya, serta persyaratan yang harus dipenuhi selama berada di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan wisata internasional dan menjaga keamanan serta kepentingan nasional. Kebijakan visa yang terlalu ketat berpotensi menjadi hambatan bagi wisatawan mancanegara karena proses masuk ke suatu negara dapat membutuhkan waktu, biaya, dan persyaratan yang lebih banyak. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu longgar juga dapat menimbulkan risiko apabila tidak disertai dengan pengawasan dan seleksi yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan visa perlu disusun secara tepat agar kemudahan bagi wisatawan tetap dapat diberikan tanpa mengabaikan fungsi pengawasan keimigrasian.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakan visa kunjungan melalui pendekatan selektivitas. Pendekatan ini menempatkan kepentingan nasional sebagai dasar dalam menentukan pemberian izin masuk bagi warga negara asing. Artinya, tidak semua warga negara asing secara otomatis memperoleh kemudahan untuk memasuki wilayah Indonesia. Pemberian visa tetap mempertimbangkan tujuan kedatangan, persyaratan, manfaat, serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan. Dengan demikian, kebijakan selektivitas visa kunjungan tidak hanya berorientasi pada pembatasan atau pemberian kemudahan, tetapi juga pada pengaturan arus masuk warga negara asing secara lebih terarah.

Menariknya, penyesuaian kebijakan visa tersebut memunculkan fenomena yang perlu dikaji lebih lanjut. Pengurangan atau pemangkasan fasilitas bebas visa pada sejumlah negara tidak serta-merta menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sebaliknya, perkembangan kunjungan wisatawan justru menunjukkan kecenderungan meningkat. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak selalu bergantung pada banyaknya fasilitas bebas visa atau kemudahan masuk yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat kemungkinan bahwa faktor lain, seperti daya tarik destinasi wisata, kualitas pelayanan, konektivitas penerbangan, promosi pariwisata, dan kondisi ekonomi internasional, turut memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan penerimaan negara. Pada umumnya, kebijakan yang membatasi atau mengurangi fasilitas visa dapat menimbulkan anggapan bahwa penerimaan negara dari sektor keimigrasian akan mengalami penurunan. Namun, kondisi yang menjadi perhatian dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa penerimaan negara tetap berada dalam kondisi stabil dan memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan selektivitas visa kunjungan. Apakah pengurangan fasilitas visa benar-benar dapat berjalan seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tetap menjaga penerimaan negara? Pertanyaan tersebut penting untuk dianalisis agar

kebijakan visa tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat kemudahan masuk, tetapi juga berdasarkan hasil yang dicapai.

Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan yang ditetapkan pada 29 Agustus 2024. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Dalam kebijakan terbaru tersebut, pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dilakukan dengan mempertimbangkan asas timbal balik, asas manfaat, keamanan negara, pariwisata, ekonomi, dan investasi. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi daftar negara yang memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian pendekatan kebijakan dari pemberian fasilitas bebas visa menuju pemberian fasilitas yang lebih selektif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Fenomena peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2025, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia tercatat mencapai 15.386.646 kunjungan. Angka tersebut menunjukkan besarnya minat wisatawan asing untuk datang ke Indonesia di tengah penyesuaian kebijakan keimigrasian. Data ini menjadi salah satu hal penting untuk melihat bagaimana perkembangan sektor pariwisata setelah pemerintah menerapkan pendekatan selektivitas dalam pemberian fasilitas visa kunjungan. Dengan demikian, kebijakan visa perlu dikaji tidak hanya dari sisi jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa, tetapi juga dari perkembangan jumlah wisatawan yang benar-benar masuk ke wilayah Indonesia.

Selain jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan negara dari sektor keimigrasian juga menjadi bagian penting dalam menilai kebijakan tersebut. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor keimigrasian pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp9 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 18,39 persen dibandingkan tahun 2023. Dari keseluruhan penerimaan tersebut, layanan visa memberikan kontribusi sekitar Rp5,03 triliun. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan bahwa sektor keimigrasian memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pendapatan negara. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan tersebut adalah penerapan kebijakan visa on arrival terhadap sejumlah negara yang sebelumnya memperoleh fasilitas bebas visa kunjungan. Perubahan mekanisme pemberian fasilitas visa tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan akses masuk warga negara asing juga dapat berhubungan dengan penerimaan negara.

Gambaran tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang menarik antara kebijakan selektivitas visa, kunjungan wisatawan mancanegara, dan penerimaan negara. Di satu sisi, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap fasilitas bebas visa dengan tujuan meningkatkan keamanan dan menerapkan prinsip selektivitas. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap menunjukkan perkembangan yang positif dan penerimaan negara dari layanan keimigrasian juga mengalami peningkatan. Kondisi ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan kebijakan visa tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak fasilitas bebas visa yang diberikan kepada negara lain. Kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan visa yang baik, serta pengawasan keimigrasian yang efektif juga dapat menjadi faktor penting dalam mendukung sektor pariwisata dan penerimaan negara.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan penerimaan negara tidak dapat langsung dianggap sebagai akibat dari kebijakan selektivitas visa. Jumlah kunjungan wisatawan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi perekonomian global, promosi pariwisata, perkembangan transportasi udara, nilai tukar mata uang, dan daya tarik destinasi wisata. Begitu pula dengan peningkatan penerimaan negara yang dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif visa, jenis layanan keimigrasian, jumlah permohonan visa, serta penggunaan layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kebijakan selektivitas visa

kunjungan berhubungan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan negara di Indonesia.

Penelitian sebelumnya juga telah membahas dampak kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan terhadap jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian Michael Revin Sinurat tahun 2024 menggunakan metode Propensity Score Matching untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut pada kuartal pertama tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jumlah kunjungan wisatawan dari negara yang terdampak dan tidak terdampak kebijakan tidak signifikan secara statistik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghentian sementara fasilitas bebas visa tidak memberikan dampak penurunan kunjungan wisatawan mancanegara secara signifikan. Temuan ini menjadi dasar yang menarik untuk melakukan kajian lebih lanjut, khususnya dengan menghubungkan kebijakan selektivitas visa dengan perkembangan kunjungan wisatawan dan penerimaan negara.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan visa di Indonesia. Pengurangan fasilitas bebas visa tidak selalu berarti berkurangnya minat wisatawan asing untuk berkunjung. Begitu pula, kebijakan selektivitas visa tidak harus dipandang sebagai hambatan bagi perkembangan pariwisata apabila pelaksanaannya dilakukan secara tepat. Kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatur arus masuk warga negara asing, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mengoptimalkan potensi penerimaan negara melalui layanan keimigrasian. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui data dan analisis yang sesuai agar dapat diketahui apakah tujuan kebijakan telah tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan selektivitas visa kunjungan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan negara di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada analisis perubahan kebijakan visa, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, serta perkembangan penerimaan negara yang berkaitan dengan layanan keimigrasian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui apakah kebijakan selektivitas visa mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara, peningkatan kunjungan wisatawan, dan optimalisasi penerimaan negara. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan visa kunjungan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat bagi Indonesia.

Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif. Metode empiris digunakan karena penelitian ini berfokus pada kondisi nyata mengenai pelaksanaan kebijakan selektivitas visa kunjungan di Indonesia serta dampaknya terhadap perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan negara. Penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis data, fakta, serta informasi yang berkaitan dengan penerapan kebijakan visa kunjungan di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya membahas ketentuan kebijakan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana pelaksanaannya dan hasil yang ditunjukkan berdasarkan kondisi di lapangan.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan perubahan kebijakan selektivitas visa kunjungan, perkembangan jumlah wisatawan mancanegara, serta penerimaan negara dari sektor keimigrasian. Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan negara sebelum dan sesudah penyesuaian kebijakan visa. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan, pertimbangan pemerintah

dalam menerapkan selektivitas visa, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan visa kunjungan, khususnya pejabat atau petugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tujuan penerapan kebijakan selektivitas visa, perubahan fasilitas visa kunjungan, mekanisme pemberian visa, serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap pelayanan keimigrasian dan penerimaan negara. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari instansi yang berwenang. Peraturan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan ketentuan keimigrasian lainnya yang berkaitan dengan pemberian visa kepada warga negara asing. Data pendukung juga diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Pariwisata.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memahami pelaksanaan kebijakan selektivitas visa kunjungan. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam bidang keimigrasian. Data sekunder diperoleh dari laporan statistik kunjungan wisatawan mancanegara, laporan penerimaan negara bukan pajak, dokumen kebijakan visa, serta berbagai publikasi resmi pemerintah. Data tersebut digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan negara dalam periode sebelum dan sesudah perubahan kebijakan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan negara pada periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan selektivitas visa. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dalam jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan negara setelah pemerintah melakukan penyesuaian terhadap fasilitas bebas visa kunjungan. Hasil perbandingan kemudian dikaitkan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen kebijakan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan serta efektivitas kebijakan tersebut.

Selanjutnya, efektivitas kebijakan dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu pencapaian tujuan kebijakan, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, perkembangan penerimaan negara, dan pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian. Pencapaian tujuan kebijakan digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan pemerintah dengan hasil pelaksanaannya. Aspek kunjungan wisatawan digunakan untuk melihat apakah penyesuaian fasilitas visa menyebabkan penurunan atau justru tetap mendukung peningkatan jumlah wisatawan. Aspek penerimaan negara digunakan untuk mengetahui perkembangan kontribusi layanan visa terhadap penerimaan negara. Sementara itu, aspek pengawasan keimigrasian digunakan untuk menilai bagaimana prinsip selektivitas diterapkan dalam mengatur masuknya warga negara asing ke Indonesia

Results and Discussion

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan selektivitas visa kunjungan di Indonesia dengan melihat perkembangan penerbitan visa, kunjungan wisatawan mancanegara, dan penerimaan negara dari sektor visa. Analisis difokuskan pada kondisi semester I tahun 2026 dan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada adanya perubahan yang cukup menarik dalam pelaksanaan kebijakan visa, yaitu ketika jumlah penerbitan visa mengalami penurunan, tetapi penerimaan negara dari sektor visa justru mengalami peningkatan.

Fenomena tersebut menjadi penting karena secara umum penurunan jumlah visa dapat dianggap akan menyebabkan penurunan penerimaan negara. Namun, data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada Januari sampai Juni 2026, jumlah visa yang diterbitkan sebanyak 3.924.500 visa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 visa. Meskipun jumlah penerbitan visa mengalami penurunan, PNBP dari sektor visa justru meningkat sebesar 6,42 persen, dari Rp2.645.712.900.000 pada semester I 2025 menjadi Rp2.815.639.500.000 pada semester I 2026. (Imigrasi Depok)

Tabel 1. Perbandingan Penerbitan Visa dan PNBP Sektor Visa Semester I 2025 dan 2026

Indikator	Semester I 2025	Semester I 2026	Perubahan
Penerbitan visa	4.209.465	3.924.500	Turun 6,77%
PNBP sektor visa	Rp2.645.712.900.000	Rp2.815.639.500.000	Naik 6,42%
Selisih penerbitan visa		-284.965	
Selisih PNBP		Rp169.926.600.000	

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026. (Imigrasi Depok)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya kondisi yang berlawanan antara jumlah penerbitan visa dan penerimaan negara. Jumlah visa yang diterbitkan berkurang sebanyak 284.965 penerbitan, tetapi penerimaan negara meningkat sekitar Rp169,93 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerbitan visa tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya penerimaan negara.

Perubahan tersebut menjadi lebih jelas apabila dilihat berdasarkan jenis visa. Penurunan terbesar terjadi pada Bebas Visa Kunjungan. Pada semester I 2025, penerbitan Bebas Visa Kunjungan mencapai 438.423 penerbitan. Pada semester I 2026, jumlah tersebut turun menjadi 52.999 penerbitan atau mengalami penurunan sebesar 87,91 persen. Pada sisi lain, Visa Kunjungan Indeks C1 justru meningkat sebesar 2,76 persen menjadi 3.829.902 penerbitan. (Situs Resmi Imigrasi Bengkalis)

Tabel 2. Perubahan Jenis Visa Semester I 2025 dan Semester I 2026

Jenis layanan	Semester I 2025	Semester I 2026	Perubahan
Total penerbitan visa	4.209.465	3.924.500	Turun 6,77%
Bebas Visa Kunjungan	438.423	52.999	Turun 87,91%
Visa Kunjungan Indeks C1	3.726.855	3.829.902	Naik 2,76%
Visa on Arrival	Data pembanding tidak dicantumkan	3.481.490	Jenis visa terbanyak pada 2026

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026. (Situs Resmi Imigrasi Bengkalis)

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan penerbitan visa terutama berasal dari berkurangnya fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Hal tersebut sejalan dengan konsep selektivitas visa, yaitu pemerintah tidak lagi berorientasi pada pemberian kemudahan masuk secara luas, tetapi melakukan seleksi berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Pada saat yang sama, penurunan Bebas Visa Kunjungan tidak menyebabkan seluruh aktivitas kunjungan wisatawan berhenti. Warga negara asing masih dapat menggunakan mekanisme visa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari tingginya penerbitan Visa on Arrival yang mencapai 3.481.490 penerbitan pada Januari sampai Juni 2026. Visa Kunjungan Indeks C1 juga mengalami peningkatan sebesar 2,76 persen. (Situs Resmi Imigrasi Bengkalis)

Dengan demikian, perubahan kebijakan lebih tepat dipahami sebagai perubahan mekanisme masuk wisatawan, bukan sebagai penghentian akses wisatawan mancanegara ke Indonesia. Wisatawan tetap dapat datang, tetapi sebagian dari mereka menggunakan mekanisme visa yang berbeda dari sebelumnya.

2. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi indikator penting untuk melihat apakah kebijakan selektivitas visa menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk datang ke Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap berada pada tingkat yang tinggi sepanjang 2026.

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk yang tercatat pada Januari sampai Juli 2026 mencapai lebih dari 7,2 juta kunjungan. Jumlah tersebut kemudian terus bertambah pada Agustus 2026. Data bulanan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kedatangan wisatawan mancanegara tetap berlangsung meskipun terdapat perubahan pada penerbitan visa. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Tabel 3. Kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui Pintu Masuk Utama Tahun 2026

Bulan	Kunjungan
Januari	1.010.000 lebih
Februari	782.600 lebih melalui pintu udara
Maret	716.819 lebih melalui pintu udara
April	889.460 lebih melalui pintu udara
Mei	932.847 lebih melalui pintu udara
Juni	954.625 lebih melalui pintu udara
Juli	1.131.626 lebih melalui pintu udara
Agustus	1.159.495 lebih melalui pintu udara

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

BPS juga mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2026 mencapai sekitar 1,39 juta kunjungan dan pada Juli 2026 jumlahnya kembali menunjukkan aktivitas yang tinggi. Pada Juni 2026, jumlah kunjungan secara tahunan mengalami penurunan 2,15 persen dibandingkan Juni 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan tidak terjadi secara merata setiap bulan, sehingga efektivitas

kebijakan perlu dilihat berdasarkan periode yang lebih panjang dan tidak hanya berdasarkan satu bulan. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Jika dikaitkan dengan kebijakan visa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah penerbitan visa tidak secara langsung menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan. Salah satu alasannya adalah wisatawan dapat menggunakan jenis visa yang berbeda. Selain itu, sebagian warga negara asing memperoleh fasilitas yang berbeda berdasarkan kebijakan pemerintah dan tujuan kedatangannya.

3. Analisis Penerimaan Negara

Temuan yang paling penting dalam penelitian ini terdapat pada perkembangan PNBP sektor visa. Pada semester I 2026, penerimaan negara dari sektor visa mencapai Rp2,815 triliun, meningkat 6,42 persen dibandingkan Rp2,645 triliun pada periode yang sama tahun 2025. Peningkatan tersebut terjadi meskipun jumlah visa yang diterbitkan mengalami penurunan sebesar 6,77 persen. (Imigrasi Depok)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah visa yang diterbitkan. Pemerintah dapat memperoleh penerimaan yang lebih tinggi melalui komposisi jenis visa yang berbeda, tarif layanan, serta pergeseran dari fasilitas bebas visa menuju jenis visa berbayar.

Dengan kata lain, berkurangnya jumlah penerbitan visa tidak selalu berarti berkurangnya penerimaan negara. Hal ini dapat terjadi karena visa yang diterbitkan memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda. Bebas Visa Kunjungan tidak menghasilkan penerimaan dari biaya visa, sedangkan layanan visa tertentu, termasuk Visa on Arrival, memberikan kontribusi terhadap PNBP.

Kondisi tersebut memperkuat fenomena penelitian bahwa selektivitas visa dapat mengurangi jumlah penerbitan fasilitas tertentu tanpa mengurangi penerimaan negara. Bahkan, penerimaan sektor visa tetap meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari pendekatan yang berorientasi pada jumlah akses masuk menuju pendekatan yang lebih selektif dan mempertimbangkan nilai ekonomi dari layanan keimigrasian.

4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya fenomena yang menarik dalam pelaksanaan kebijakan selektivitas visa Indonesia. Jumlah penerbitan visa pada semester I 2026 mengalami penurunan sebesar 6,77 persen. Akan tetapi, PNBP dari sektor visa justru meningkat sebesar 6,42 persen. Pada saat yang sama, penurunan terbesar terjadi pada Bebas Visa Kunjungan, sedangkan Visa Kunjungan Indeks C1 meningkat dan Visa on Arrival menjadi jenis visa yang paling banyak diterbitkan. (Imigrasi Depok)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan visa tidak tepat jika hanya diukur dari jumlah visa yang diterbitkan. Jika ukuran yang digunakan hanya jumlah penerbitan, maka kebijakan 2026 dapat dianggap mengalami penurunan efektivitas karena jumlah visa lebih sedikit. Namun, apabila efektivitas diukur berdasarkan kemampuan kebijakan mencapai tujuan selektivitas, menjaga arus wisatawan, dan meningkatkan penerimaan negara, hasilnya menunjukkan gambaran yang berbeda.

Penurunan Bebas Visa Kunjungan sebesar 87,91 persen merupakan indikator kuat adanya perubahan kebijakan dari pemberian fasilitas masuk yang lebih luas menuju mekanisme yang lebih selektif. Namun, wisatawan tetap dapat menggunakan jenis visa lain. Hal tersebut menyebabkan penurunan fasilitas bebas visa tidak secara otomatis menghilangkan aktivitas perjalanan wisatawan ke Indonesia. (Situs Resmi Imigrasi Bengkalis)

Fenomena tersebut dapat disebut sebagai pergeseran mekanisme, bukan penurunan aktivitas pariwisata secara langsung. Wisatawan yang sebelumnya memperoleh fasilitas bebas visa dapat beralih menggunakan mekanisme visa lain apabila memenuhi persyaratan. Dalam konteks ini, pemerintah tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui penerimaan PNBP dari layanan visa.

Dari sisi penerimaan negara, hasil penelitian menunjukkan bahwa selective policy memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas penerimaan. PNBP sektor visa meningkat Rp169,93 miliar pada semester I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Peningkatan ini terjadi ketika jumlah penerbitan visa justru menurun. (Imigrasi Depok)

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kualitas dan komposisi layanan lebih penting daripada sekadar jumlah penerbitan. Fasilitas bebas visa memang dapat meningkatkan kemudahan masuk, tetapi tidak menghasilkan penerimaan biaya visa. Sebaliknya, penggunaan jenis visa berbayar dapat menghasilkan PNBP meskipun jumlah penerbitannya lebih sedikit.

Dari sisi pariwisata, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia tidak hanya ditentukan oleh fasilitas bebas visa. Data BPS menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara tetap berada pada tingkat yang tinggi sepanjang 2026. Namun, karena pada Juni 2026 terdapat penurunan 2,15 persen secara tahunan, peningkatan wisatawan tidak boleh dianggap sepenuhnya sebagai dampak kebijakan visa. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Dengan demikian, hasil penelitian lebih tepat menyimpulkan bahwa kebijakan selektivitas visa sejauh data yang tersedia menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan aktivitas kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor visa. Namun, penelitian belum dapat menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan satu-satunya penyebab peningkatan penerimaan atau kunjungan wisatawan.

Tabel 5. Kesimpulan Hasil Analisis Efektivitas Kebijakan

Indikator	Hasil	Penilaian
Penerbitan visa	Turun 6,77 persen	Menunjukkan adanya selektivitas dan perubahan komposisi visa
Bebas Visa Kunjungan	Turun 87,91 persen	Menunjukkan pengurangan fasilitas bebas visa
Visa Kunjungan C1	Naik 2,76 persen	Menunjukkan adanya pergeseran ke jenis visa lain
PNBP sektor visa	Naik 6,42 persen	Menunjukkan peningkatan penerimaan negara
Kunjungan wisatawan	Tetap tinggi dan berlangsung sepanjang 2026	Menunjukkan tidak adanya penghentian aktivitas wisatawan secara umum
Efektivitas kebijakan	Positif pada aspek selektivitas dan penerimaan	Kebijakan menunjukkan hasil positif, tetapi dampak kausal perlu diuji lebih lanjut

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, kebijakan selektivitas visa kunjungan Indonesia dapat dinilai cukup efektif dalam mencapai tujuan pengaturan masuknya warga negara asing sekaligus mempertahankan penerimaan negara. Fenomena utama penelitian justru terletak pada kondisi ketika jumlah penerbitan visa menurun, tetapi penerimaan negara meningkat dan kunjungan wisatawan tetap berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan visa tidak harus diukur dari banyaknya visa yang diterbitkan, tetapi dari kemampuan pemerintah mengatur jenis dan kualitas kedatangan

warga negara asing sehingga tetap memberikan manfaat bagi negara.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan selektivitas visa kunjungan di Indonesia menunjukkan efektivitas dalam mengatur akses masuk warga negara asing tanpa secara langsung mengurangi kunjungan wisatawan mancanegara. Penurunan penerbitan visa pada semester I tahun 2026 sebesar 6,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2025, terutama pada fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menurun sebesar 87,91%, tidak diikuti dengan penurunan kunjungan wisatawan secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wisatawan masih dapat menggunakan jenis visa atau fasilitas keimigrasian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi penerimaan negara, kebijakan selektivitas visa juga menunjukkan hasil yang positif. Meskipun jumlah penerbitan visa menurun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa justru meningkat sebesar 6,42%, yaitu dari sekitar Rp2,65 triliun menjadi Rp2,82 triliun pada semester I tahun 2026. Dengan demikian, efektivitas kebijakan selektivitas visa tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penerbitan visa, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga kunjungan wisatawan, meningkatkan pengawasan keimigrasian, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, peningkatan kunjungan wisatawan tidak dapat dikaitkan sepenuhnya dengan kebijakan visa karena terdapat faktor lain, seperti promosi pariwisata, konektivitas penerbangan, kondisi ekonomi, daya tarik destinasi, dan keamanan

References

Abdullah, R. R. (2019). Urgensi dan Inovasi dalam Pembaharuan Peraturan Teknis mengenai Paspor Biasa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(1), 51–68. https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2019.V13.51-68

Adityaprastio, A., Yogopiyatno, J., & Zulhakim, A. A. (2024). ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN INOVASI SIPADEK DI DPMPTSP KOTA BENGKULU. *Widyanata*, *21*(1), 26–36. https://doi.org/10.54836/WIDYANATA.V21I1.1318

Alfikri, M. A., & Sarnawa, B. (2025). PERAN JASA RAHARJA CABANG YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT. *Borneo Law Review*, *8*(2), 164–173. https://doi.org/10.35334/BOLREV.V8I2.6200

Ariantini, M., Belferik, R., Sari, O., Munizu, M., & Ginting, E. (2023). *Sistem Pendukung Keputusan: Konsep, Metode, dan Implementasi*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2e_JEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA32&dq=Pendukung+Keputusan+(SPK)&ots=b99Tz9wocr&sig=8KNvaO21F6hyUc5NrUGqfCiB8v8

Batavia, T., Bawono, S. K., & Hamdi, M. A. (2022). EVALUASI PELAYANAN DISABILITAS MELALUI INOVASI SI JEMPOL SEMAR KANTOR IMIGRASI SEMARANG. *Journal of Administration and International Development*, *2*(2), 53–63. https://doi.org/10.52617/JAID.V2I2.322

C Jensen, M., & H Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

Dilla Amarini, Dilla Amarini, Melania, Rifqi Amrulloh, & Fredy Jayen. (2025). Pengaruh Aksesibilitas, Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik Terhadap Kepuasan Penumpang Trans Banjarbakula(Studi Kasus Penumpang Terminal Gambut Barakat Tipe A). *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, *8*(1), 512–529. https://doi.org/10.30737/JIMEK.V8I1.6457

Efendi, Y., Abdurahman, A., & Paerah, A. M. K. (2024). PENGARUH INOVASI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, *5*(2), 42. https://doi.org/10.53712/ASPIRASI.V5I2.2592

Jannah, R. N., Hardinasta, D. E., Akbar, R. S., & Wirdhiningsih, V. (2023). INOVASI PELAYANAN PASPOR KERUMAH (PAPUMA) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI JEMBER. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.52617/JIKK.V6I1.408

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2015). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure Also published in Foundations of Organizational Strategy. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition Journal of Financial Economics*, (4).

Mahendra, G., Tampubolon, L., Arni, S., & Kharisma, L. (2023). *SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (Teori dan Penerapannya dalam berbagai Metode)*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Vzy2EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pendukung+Keputusan+(SPK)&ots=RdNB8Qi1HN&sig=71py09pG5IdsTm4WpnfEcLR-I-4

Malau, E., Waskito, B., & Pienrasmi, H. (2026). Komunikasi Inovasi Pelayanan Kunjungan Simpatik Pasien Ortotik Prostetik (Studi Kasus Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Imanuel Way Halim). *Edutik : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *6*(4), 1987–1996. https://doi.org/10.67142/EDUTIK.V6I4.500

Malik, R. A. S., Priyatno, M. B., & Wibowo, P. D. K. (2025a). RESPONSIVITAS SEBAGAI KATALIS KEPUASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN: KAJIAN LITERATUR TERHADAP INOVASI DIGITAL M-PASPOR DAN EAZY PASSPORT. *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, *7*(1), 61–73. https://doi.org/10.52617/TEMATICS.V7I1.775

Malik, R. A. S., Priyatno, M. B., & Wibowo, P. D. K. (2025b). RESPONSIVITAS SEBAGAI KATALIS KEPUASAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN: KAJIAN LITERATUR TERHADAP INOVASI DIGITAL M-PASPOR DAN EAZY PASSPORT. *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, *7*(1), 61–73. https://doi.org/10.52617/TEMATICS.V7I1.775

Muzaki, M., Nyoman Putu Martini, N., Susbiyani, A., & Qomariah, N. (2023). Pengaruh Kualitas dan Inovasi Pelayanan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Melalui Kepuasan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. *RELASI : JURNAL EKONOMI*, *19*(2), 247–267. https://doi.org/10.31967/RELASI.V19I2.856

Natasya Salsabila Pramudita, Eva Hany Fanida, Meirinawati, & Trenda Aktiva Oktariyanda. (2026). Pengaruh Inovasi Pelayanan SOS MAS (Service on Saturday di Kecamatan Kebomas) terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, *3*(1), 41–60. https://doi.org/10.62383/HUKUM.V3I1.866

Noor, M., & Indrawati, W. (2022). Inovasi Pelayanan Skck Online Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Polres Gresik. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, *11*(1), 32–39. https://doi.org/10.38156/GOVERNANCEJKMP.V11I1.83

Nova, K., & Hikmah, H. (2022). Pengaruh Inovasi Pelayanan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada kntor Kecamatan Belakang Padang Di Kota Batam. *JURNAL EKUIVALENSI*, *8*(1), 29–39. https://doi.org/10.51158/EKUIVALENSI.V8I1.657

Nurcahyanti, K. K. A. (2025). Inovasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Era Digital: Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan Primer. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 6025–6030. https://doi.org/10.31004/RIGGS.V4I3.2838

Oktabriyanti, A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2021). INOVASI PELAYANAN JASA PENGIRIMAN PAKET TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PT. POS

INDONESIA. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, *1*(1), 19–26. https://doi.org/10.46730/JSDMU.V1I1.7

Rofiah, C. (2022). ANALISIS DATA KUALITATIF: MANUAL ATAU DENGAN APLIKASI? *Develop*, *6*(1). https://doi.org/10.25139/dev.v6i2.4389

Rofiah, C., & Burhan Bungin. (2024). ANALISIS DATA KUALITATIF: MANUAL DATA ANALISIS PROSEDUR. *Develop*, *8*(1). https://doi.org/10.25139/dev.v8i1.7319

Situmeang, I. V. O., Kencana, W. H., Meisyanti, Rahmawati, K. J., & Nugroho, H. S. (2025). Pengaruh Kredibilitas Pendamping Program Dan Mutu Informasi Terhadap Pengambilan Keputusan Inovasi Aplikasi Smart Government (Survey Pada Masyarakat Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon). *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *9*(3), 239–254. https://doi.org/10.37817/IKRAITH-HUMANIORA.V9I3.5369

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&DSugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In Metodelogi Penelitian.). In *Metodelogi Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*.

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Number March).

Sukawati, H., Widyawati, W., & Sulmiah, S. (2024). BUDAYA ORGANISASI DAN INOVASI PELAYANAN TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAROS. *Jurnal Administrasi Negara*, *30*(1), 21–47. https://doi.org/10.33509/JAN.V30I1.2801

Tuti Winarsi, Slamet Bambang Riono, Muhammad Syaifulloh, Nur Khojin, & Hendri Sucipto. (2026). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik , Komunikasi, Inovasi Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, *4*(1), 53–66. https://doi.org/10.59024/JUMEK.V4I1.737

Wahyuningsih, W., & Prabhata, I. (2024). Pengaruh Digitalisasi Dan Inovasi Pelayanan Website Jakevo Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Keluarahan Cempaka Putih Barat Kota Jakarta Pusat. *Reformasi Administrasi*, *11*(2), 244–252. https://doi.org/10.31334/REFORMASI.V11I2.4195